

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewi Sinta Oktamia, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 17.
- Erwan Agus Purwanto, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. YOGYAKARTA: GAVA MEDIA.
- Firdaus, I. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KECAMATAN JIPUT KABUPATEN PANDEGLANG. *INDONESIA DOKUMEN*, 29.
- Idami, J. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil). *repository*, 14-27.
- Meleong, L. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Nugroho, D. R. (2017). *PublicPolicy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanti, D. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (KTP-el) DI KABUPATEN SUKABUMI. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (JAP)*, 146.
- Rahayu Subekti, I. B. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *unwiku*, 36.
- Rahayu Subekti, I. B. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Di Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *CAKRAWALA HUKUM*, 37-44.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sylvia Aprillia, M. H. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG. *jurnal.unpad*, 76.

Widinarsih, D. (2019). PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI. *jurnalkesos*, 138-139.

Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yogyakarta : CAPS, 2014.

#### **Peraturan-peraturan :**

Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta.

Kota Bandung. 2007. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung: Bandung.

Kota Bandung. 2016. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung: Bandung.

Pemerintah Pusat. 1997. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Jakarta.

Pemerintah Pusat. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.

Pemerintah Pusat. 2013. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.

Pemerintah Pusat. 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  
Penyandang Disabilitas. Jakarta.